



Kompleksitas Pelaksanaan Distribusi Bantuan Sosial untuk Korban Banjir oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Mayla Asri Fadilah Muchtar

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah rawan banjir yang memerlukan penanganan cepat dan efektif terutama dalam hal distribusi bantuan sosial (bansos). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam proses pendistribusian bantuan sosial (bansos) bagi korban banjir, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta menelaah dampak distribusi tersebut terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji literatur dari jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan aktif dalam menyalurkan bansos berupa sembako, dapur umum, dan fasilitas pengungsian, dengan dukungan koordinasi antarinstansi. Namun, proses distribusi masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakakuratan data penerima, akses yang sulit, koordinasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, serta keterbatasan anggaran. Distribusi bansos terbukti memiliki dampak besar dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjaga kesehatan, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pemulihan ekonomi korban banjir. Untuk ke depan, diperlukan upaya seperti digitalisasi pendataan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor guna memperkuat sistem distribusi bansos. Kajian ini diharapkan menjadi masukan bagi perbaikan manajemen distribusi bantuan sosial agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Kata kunci: Bantuan Sosial, Banjir, Dinas Sosial, Kabupaten Sidoarjo, Penanggulangan Bencana

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i2.5470>

*Correspondence: Mayla Asri Fadilah Muchtar

Email: maylaasrifadilah@gmail.com

Received: 22-12-2025

Accepted: 22-01-2026

Published: 22-02-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Sidoarjo Regency is a flood-prone area that requires quick and effective handling, especially in terms of social assistance distribution. This study aims to analyze the role of the Sidoarjo Regency Social Service in the process of distributing social assistance to flood victims, identify various obstacles encountered in the field, and examine the impact of the distribution on meeting the needs of the community. The research uses a qualitative method with a literature review approach, examining literature from journals, government reports, and other relevant documents. The results of the study show that the Social Services Agency plays an active role in distributing social assistance in the form of basic food supplies, public kitchens, and evacuation facilities, with the support of inter-agency coordination. However, the distribution process still faces various obstacles, such as inaccurate recipient data, difficult access, suboptimal coordination, limited human and logistical resources, and budget constraints. The distribution of social assistance has proven to have a significant impact in meeting basic needs, maintaining health, strengthening social resilience, and supporting the economic recovery of flood victims. In the future, efforts such as digitizing data collection, increasing human resource capacity, strengthening infrastructure, and cross-sector collaboration are needed to strengthen the social assistance distribution system. This study is expected to provide input for improving the management of social assistance distribution so that it is more effective and responsive to the needs of communities affected by disasters.

Keywords: Social Assistance, Flood, Social Services Agency, Sidoarjo Regency, Disaster Management

Pendahuluan

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakter geografis rawan terhadap bencana banjir, terutama saat musim hujan tiba. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo, banjir yang terjadi di wilayah ini tidak hanya bersifat musiman, tetapi juga sering kali terjadi akibat luapan sungai, curah hujan tinggi, serta buruknya sistem drainase di beberapa titik rawan banjir (BPBD Sidoarjo, 2024). Banjir yang melanda tidak hanya berdampak pada rusaknya infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi dan sosial warga, terutama di daerah pesisir dan dataran rendah.

Dalam situasi darurat tersebut, salah satu sektor yang berperan penting adalah sektor sosial, khususnya melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Dinas Sosial memiliki mandat untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana. Peran ini diwujudkan dalam bentuk distribusi bantuan sosial (bansos) yang meliputi paket sembako, layanan dapur umum, hingga penyediaan fasilitas pengungsian yang layak. Bantuan sosial yang cepat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk mencegah risiko lanjutan seperti kelaparan, penyakit, dan tekanan psikologis bagi para korban bencana (Dinas Sosial Sidoarjo, 2023).

Menurut penelitian Oktaviani et al. (2024), efektivitas penyaluran bantuan sosial sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dengan lembaga-lembaga terkait, seperti BPBD, Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta relawan lokal. Selain itu, data yang akurat mengenai jumlah dan lokasi warga terdampak juga menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan distribusi bansos. Namun, tidak jarang ditemui kendala seperti akses yang sulit dijangkau akibat genangan air tinggi, minimnya relawan di lokasi bencana, dan keterbatasan logistik, yang berpotensi memperlambat proses distribusi bantuan. Selain itu temuan senada juga muncul dalam Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana banjir di Kabupaten Luwu yang menyoroti keterlibatan dinas sosial dalam penyediaan kebutuhan dasar, bantuan logistik, dan tantangan koordinasi lintas sektor dalam upaya pemulihan sosial-ekonomi korban bencana. Penelitian tersebut menambah dimensi pemahaman tentang hambatan operasional yang sejalan dengan temuan penelitian ini (Angraini, 2025).

Selain itu Setiawan et al. (2024) mengungkapkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir meliputi tiga tahap utama, yaitu tahap pra bencana dengan mengadakan sosialisasi terkait pembuatan peta rawan bencana, tahap tanggap darurat yang melibatkan pertolongan dan penyelamatan, serta tahap pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana. Untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul, BPBD perlu selalu dalam kondisi siap siaga serta berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diterapkan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanggulangan bencana pada tahap pra bencana. Temuan ini relevan dengan kondisi di Kabupaten Sidoarjo yang secara geografis rawan terhadap banjir, di mana penanganan bencana memerlukan sinergi antara berbagai instansi, termasuk BPBD dan Dinas Sosial

Selain Dinas Sosial dan BPBD, peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian yang dilakukan oleh

Yuliani et al.(2020) menunjukkan bahwa TAGANA menjalankan tugasnya melalui tiga tahap utama, yaitu tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Namun, dalam pelaksanaannya TAGANA menghadapi kendala berupa waktu kerja yang belum efektif serta keterbatasan sarana prasarana, sehingga seringkali harus meminjam peralatan dari Dinas Sosial Provinsi, yang berdampak pada optimalisasi kinerja TAGANA.

Kendala-kendala tersebut sejalan dengan tantangan yang ditemukan dalam distribusi bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, di mana koordinasi lintas lembaga seperti BPBD dan TAGANA menjadi faktor krusial dalam keberhasilan penanganan bencana. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran, kendala, serta sinergi antara Dinas Sosial, BPBD, dan TAGANA sangat penting untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan sosial dan layanan darurat kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Sidoarjo.

Selain aspek teknis, keberadaan bansos juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Bantuan yang diberikan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis. Kehadiran negara melalui Dinas Sosial memberi dampak psikologis positif bagi masyarakat terdampak bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi musibah ini (Republik Jatim, 2024).

Melihat urgensi dan kompleksitas peran Dinas Sosial dalam distribusi bansos saat bencana banjir, sangat penting dilakukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana proses distribusi tersebut dilakukan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya bagi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan sistem distribusi bantuan sosial di masa yang akan datang, agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang dipadukan dengan wawancara sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, artikel berita, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema distribusi bantuan sosial saat bencana banjir. Untuk memperkuat analisis, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa pihak yang terlibat dalam proses distribusi bantuan di Kabupaten Sidoarjo, seperti staf Dinas Sosial, relawan Tagana, dan warga terdampak. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran aktual di lapangan mengenai kendala yang dihadapi, dampak bantuan terhadap masyarakat, serta upaya perbaikan distribusi yang telah dan sedang dilakukan. Dengan menggabungkan studi literatur dan wawancara, diharapkan hasil penelitian ini dapat menggambarkan situasi secara komprehensif dan kontekstual

Teori yang digunakan adalah Teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons, yang memandang Dinas Sosial sebagai lembaga yang berfungsi menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat saat terjadi krisis. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam distribusi bansos serta dampaknya bagi masyarakat terdampak bencana.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Dinas Sosial dalam Distribusi Bantuan Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas utama untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir. Dalam menjalankan tugas ini, Dinas Sosial bertanggung jawab memastikan bahwa setiap warga yang menjadi korban banjir mendapatkan bantuan yang layak sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Bantuan tersebut meliputi distribusi sembako, pelayanan dapur umum, hingga penyediaan tempat pengungsian yang layak. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga keselamatan serta kesejahteraan masyarakat terdampak (BPBD Sidoarjo, 2024).

Koordinasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial. Instansi ini bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta pemerintah desa untuk memastikan bantuan bisa disalurkan secara tepat sasaran. Setiap tahap distribusi diawasi dan dicatat agar tidak terjadi penyelewengan dan seluruh bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Sistem kerja yang kolaboratif ini juga didukung oleh prosedur tetap yang mengatur pembagian tugas di lapangan mulai dari pendataan korban hingga pendistribusian bantuan secara langsung (Dinas Sosial Sidoarjo, 2023).

Proses pendistribusian bantuan sosial biasanya dimulai dengan pengumpulan data awal yang dilakukan oleh tim lapangan bersama aparat desa setempat. Setelah data terkumpul dan diverifikasi, Dinas Sosial mulai menyalurkan bantuan secara bertahap ke wilayah terdampak. Setiap titik pengungsian dan dapur umum yang dibuka juga dikelola langsung oleh tim Dinas Sosial dan Tagana, guna memastikan layanan berjalan dengan baik. Seluruh proses ini bertujuan agar para korban bencana dapat segera memperoleh kebutuhan dasar mereka tanpa menunggu terlalu lama (Republik Jatim, 2023).

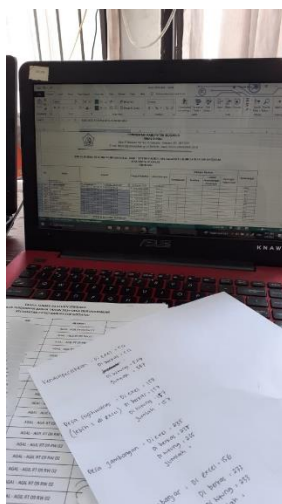
Selain mendistribusikan bantuan, Dinas Sosial juga bertugas memantau perkembangan kondisi masyarakat di lokasi bencana. Hal ini dilakukan agar jika ada kebutuhan mendesak yang muncul di luar perencanaan awal, tim dapat segera memberikan respon. Monitoring ini mencakup pemantauan kondisi kesehatan, kebutuhan pangan tambahan, hingga kesiapan fasilitas pengungsian yang ada. Dengan pendekatan seperti ini, Dinas Sosial berusaha memastikan seluruh aspek dasar yang dibutuhkan masyarakat terdampak dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Peran Dinas Sosial dalam distribusi bantuan sosial menunjukkan bahwa keberadaan lembaga ini sangat penting dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat saat bencana terjadi. Dengan adanya koordinasi yang baik dan pelaksanaan distribusi yang tepat, Dinas Sosial mampu menjadi garda terdepan dalam pemulihan awal masyarakat terdampak banjir. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa peran negara hadir secara nyata untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi warganya di saat-saat genting (Hadi, 2020).

2. Kendala dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Salah satu kendala utama yang dihadapi Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial saat bencana banjir adalah masalah akurasi data penerima bantuan. Dalam kondisi darurat, pendataan yang cepat seringkali dilakukan secara manual, sehingga berisiko terjadi kesalahan data seperti pendataan ganda atau ada warga terdampak yang tidak

terdata. Akibatnya, proses distribusi bantuan menjadi tidak merata dan memicu kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu, perubahan kondisi lapangan yang dinamis, seperti bertambahnya jumlah warga terdampak secara tiba-tiba, juga menyulitkan tim dalam memperbarui data secara real-time. Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan teknologi dan sistem pendataan yang lebih baik agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran. Beberapa studi menunjukkan bahwa validasi data yang kuat sangat berpengaruh terhadap efektivitas distribusi bantuan (Anwar & Mustofa, 2021).



Gambar 1. Pendataan data korban banjir

Kendala lain yang sering terjadi adalah aksesibilitas wilayah terdampak yang sulit dijangkau. Banyak daerah di Kabupaten Sidoarjo yang terendam cukup dalam saat banjir, sehingga kendaraan roda empat atau bahkan sepeda motor tidak dapat melewati jalan yang tergenang air. Dalam kondisi tertentu, tim distribusi harus menggunakan perahu karet atau alat transportasi alternatif yang memakan waktu lebih lama. Kondisi ini memperlambat pengiriman bantuan ke lokasi yang benar-benar membutuhkan. Selain faktor genangan air, ada juga wilayah dengan infrastruktur jalan yang rusak parah sehingga menyulitkan akses distribusi bantuan. Situasi ini menggambarkan betapa pentingnya kesiapan logistik dan alat bantu yang memadai untuk menghadapi kondisi darurat di lapangan (Yulianti, 2022).

Masalah koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam distribusi bantuan sosial. Dalam proses distribusi bantuan, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai pihak seperti BPBD, Tagana, aparat desa, dan relawan lokal. Namun, kadang terjadi miskomunikasi atau tumpang tindih tugas di lapangan yang menyebabkan bantuan menjadi terlambat atau bahkan salah sasaran. Koordinasi yang lemah ini biasanya disebabkan oleh tidak adanya forum komunikasi yang rutin atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas antar lembaga terkait. Diperlukan manajemen yang lebih terintegrasi agar setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman dan pembagian tugas yang jelas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa koordinasi yang baik sangat menentukan kecepatan dan ketepatan dalam proses distribusi bantuan (Handayani & Prasetyo, 2020).

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses distribusi bantuan sosial. Dalam situasi darurat, jumlah petugas dan relawan yang turun ke lapangan seringkali tidak sebanding dengan jumlah warga yang

terdampak. Hal ini menyebabkan distribusi bantuan berjalan lebih lambat dan tidak semua wilayah terdampak bisa segera terlayani. Selain itu, beberapa petugas dan relawan terkadang kurang memiliki pelatihan khusus dalam menghadapi bencana, sehingga kinerja mereka di lapangan tidak optimal. Peningkatan kapasitas dan pelatihan rutin bagi relawan dan petugas Dinas Sosial sangat penting agar mereka lebih siap saat terjadi bencana. Studi menunjukkan bahwa SDM yang kompeten dapat mempercepat pemulihan di daerah bencana (Rahmawati & Sulisty, 2023).

Permasalahan lain yang sering muncul adalah keterbatasan logistik dan perlengkapan distribusi yang memadai. Stok bantuan sosial yang tersedia di gudang seringkali cepat habis jika terjadi bencana besar atau berkepanjangan. Selain itu, alat-alat pendukung seperti kendaraan operasional, perahu karet, dan perlengkapan dapur umum kadang dalam kondisi kurang layak atau jumlahnya tidak mencukupi. Kekurangan ini tentu berdampak pada kelancaran distribusi bantuan, terutama di daerah yang membutuhkan penanganan cepat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan logistik yang lebih matang dan pengadaan alat yang memadai sebelum musim bencana datang. Literatur menyebutkan bahwa kesiapan logistik yang memadai sangat berpengaruh terhadap ketahanan bencana (Fadilah, 2020).

Faktor cuaca yang ekstrem juga menjadi tantangan besar dalam proses distribusi bantuan sosial. Curah hujan yang tinggi dan kondisi banjir yang terus meluas dapat menghentikan sementara proses distribusi bantuan karena alasan keselamatan. Kadang tim distribusi harus menunda pengiriman bantuan hingga cuaca membaik, yang tentu berdampak pada keterlambatan bantuan sampai ke tangan warga terdampak. Situasi ini menjadi dilema karena di satu sisi kebutuhan masyarakat sangat mendesak, tetapi di sisi lain keselamatan tim di lapangan juga harus dijaga.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala klasik yang sangat memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial saat terjadi bencana banjir. Dinas Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab utama sering kali harus berhadapan dengan kenyataan bahwa dana operasional yang tersedia tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan di lapangan. Anggaran yang minim ini tidak hanya berdampak pada jumlah bantuan yang dapat disalurkan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesiapan fasilitas dan tenaga pendukung seperti alat transportasi, dapur umum, serta honor relawan. Kondisi ini menyebabkan banyak program bantuan yang sifatnya mendesak harus tertunda atau berjalan tidak optimal karena keterbatasan dana. Bahkan dalam beberapa kasus, Dinas Sosial harus mengandalkan bantuan dari pihak ketiga seperti lembaga swasta atau donatur untuk menutupi kekurangan tersebut. Minimnya anggaran juga membuat upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kebencanaan tidak dapat dilaksanakan secara rutin, padahal ini sangat penting untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa depan. Seperti disebutkan dalam penelitian Paripurno & Prasetyo (2021), keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor utama yang memperlambat penanganan bencana dan menurunkan efektivitas program sosial, sehingga perlu ada evaluasi berkala terkait alokasi dana agar pelaksanaan distribusi bantuan bisa berjalan lebih maksimal.

Bukti lapangan juga menguatkan hal ini. Salah satu staf pelaksana lapangan dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Ibu Yuli, mengungkapkan dalam wawancara: *"Kami sering kesulitan saat pendataan awal karena kondisi di lapangan cepat berubah. Terkadang jumlah*

pengungsi bertambah dalam hitungan jam, sementara data awal sudah masuk. Hal ini membuat distribusi sembako dan kebutuhan lainnya jadi tidak seimbang, karena ada warga terdampak yang belum tercatat. Koordinasi dengan desa sebenarnya ada, tapi saat banjir parah, komunikasi juga sering terputus." Selain itu, seorang anggota relawan Tagana, Bapak Anwar, juga menyampaikan: *"Akses ke beberapa titik banjir sangat sulit. Bahkan kami pernah harus dorong motor sampai satu kilometer lebih karena genangan terlalu dalam dan tidak bisa dilewati kendaraan."* Pernyataan ini memperkuat fakta bahwa tantangan distribusi tidak hanya berkaitan dengan data, tetapi juga kondisi geografis dan logistik yang tidak selalu ideal.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas distribusi bantuan sosial memerlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan pusat dalam hal dukungan anggaran dan kebijakan. Dinas Sosial harus terus berupaya melakukan perbaikan dalam hal pendataan, koordinasi, dan logistik agar distribusi bantuan ke depan bisa lebih cepat, tepat, dan merata. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga swasta maupun masyarakat sipil juga menjadi salah satu cara yang dapat memperkuat jaringan penanggulangan bencana. Dengan begitu, diharapkan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dapat semakin optimal di masa mendatang. (Sutanto, 2021).

3. Dampak Distribusi Bantuan Sosial terhadap Pemenuhan Kebutuhan Korban Banjir

Distribusi bantuan sosial memberikan dampak yang besar dalam membantu korban banjir memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pada masa-masa awal bencana, warga terdampak umumnya sangat bergantung pada bantuan pemerintah maupun relawan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal sementara. Bantuan sosial yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memegang peranan penting dalam memastikan tidak ada warga yang terabaikan. Selain itu, bantuan tersebut membantu meringankan beban masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan akibat bencana. Proses distribusi yang cepat dan tepat sasaran menjadi kunci agar kebutuhan para korban dapat segera terpenuhi. Dengan adanya bantuan yang memadai, masyarakat dapat bertahan dalam kondisi darurat hingga situasi kembali stabil.

Tidak hanya pada aspek kebutuhan pokok, distribusi bantuan sosial juga berdampak pada kesehatan fisik korban banjir. Ketika banjir melanda, potensi munculnya berbagai penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan cenderung meningkat akibat lingkungan yang kotor dan lembab. Kehadiran bantuan berupa obat-obatan dan layanan kesehatan darurat sangat membantu meminimalisir risiko tersebut. Menurut Handayani dkk. (2021), penyediaan layanan kesehatan yang terintegrasi dalam program bantuan sosial efektif dalam menekan angka kesakitan di lokasi pengungsian. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan bukan hanya soal barang, tetapi juga layanan yang mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kolaborasi antara Dinas Sosial dan lembaga kesehatan sangat diperlukan agar dampak positif bantuan sosial bisa optimal. Bantuan kesehatan menjadi salah satu indikator keberhasilan distribusi bantuan sosial yang menyeluruh.

Dari segi psikologis, distribusi bantuan sosial juga berkontribusi dalam menjaga ketahanan mental korban banjir. Kondisi kehilangan tempat tinggal atau harta benda seringkali membuat masyarakat mengalami stres atau trauma. Kehadiran bantuan yang cepat memberikan rasa aman dan kepedulian yang membantu memulihkan kondisi emosional mereka. Selain itu, masyarakat yang mendapatkan bantuan merasa dihargai dan

diperhatikan oleh pemerintah, sehingga memperkuat kepercayaan mereka terhadap negara. Bantuan yang datang secara rutin dan tidak terputus juga menjadi salah satu bentuk dukungan moral yang memperkuat solidaritas sosial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong di masyarakat. Oleh karena itu, dampak psikologis dari distribusi bantuan sosial tidak boleh diabaikan.

Bantuan sosial juga memengaruhi upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca-banjir. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, masyarakat memiliki kesempatan untuk mulai bangkit kembali secara ekonomi, misalnya dengan memperbaiki usaha kecil yang sempat terhenti akibat banjir. Bantuan yang bersifat berkelanjutan sangat membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi warga terdampak. Menurut Suparno (2022), distribusi bantuan sosial dapat menjadi stimulus bagi ekonomi lokal yang terdampak bencana, terutama jika ada program bantuan lanjutan yang mendukung sektor produktif. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sementara, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mandiri kembali. Oleh sebab itu, keberlanjutan program bantuan sosial menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pemulihan pasca-bencana. Dengan demikian, distribusi bantuan sosial tidak hanya menyelamatkan masyarakat secara fisik, tetapi juga membuka peluang pemulihan ekonomi yang lebih cepat.

Selain dampak langsung terhadap kebutuhan pokok, distribusi bantuan sosial juga memiliki pengaruh dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana selanjutnya. Ketika masyarakat mendapatkan pengalaman positif dalam proses distribusi bantuan, mereka akan lebih percaya diri dan siap menghadapi potensi bencana di masa depan. Pengalaman tersebut juga menjadi pembelajaran bagi warga untuk lebih aktif dalam kegiatan mitigasi bencana. Dengan demikian, bantuan sosial secara tidak langsung membangun ketahanan sosial masyarakat. Ini adalah salah satu manfaat jangka panjang yang sering kali luput dari perhatian. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki sistem distribusi bantuan agar semakin efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terakhir, distribusi bantuan sosial yang dilakukan secara transparan dan merata juga membantu mengurangi potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Dalam beberapa kasus, ketidakadilan dalam pembagian bantuan dapat memicu kecemburuan sosial yang berujung pada ketegangan antarwarga. Bantuan yang terkoordinasi dengan baik akan meminimalisir risiko tersebut dan menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Menurut Novianti (2023), transparansi dalam proses distribusi bantuan sosial merupakan salah satu kunci utama untuk menjaga harmoni sosial selama masa krisis. Oleh sebab itu, selain memperhatikan kuantitas bantuan, kualitas proses distribusi juga harus menjadi fokus utama. Dengan demikian, bantuan sosial benar-benar dapat memberikan dampak yang positif dan menyeluruh bagi korban banjir.



Gambar 2. Penyaluran sembako melalui balai desa

Dampak nyata dari bantuan sosial juga dirasakan langsung oleh warga. Dalam wawancara dengan Bu Novi, warga Desa Banjarwungu yang menjadi salah satu penerima bantuan sosial, ia menyampaikan: *“Waktu banjir kemarin, saya dan anak-anak mengungsi ke balai desa. Kami dapat bantuan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Walaupun tidak mewah, tapi sangat membantu karena kami benar-benar tidak bisa masak atau cari makan.”* Sementara itu, Pak Heri, seorang ketua RT setempat, juga menambahkan: *“Bantuan dari Dinas Sosial sangat cepat datang saat banjir. Yang penting buat warga itu bantuan datang cepat. Warga juga jadi merasa diperhatikan, jadi lebih tenang walaupun rumahnya terendam.”*

4. Upaya untuk Meningkatkan Efektivitas Distribusi Bantuan Sosial di Masa Depan

Untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan sosial di masa depan, salah satu upaya utama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan. Data yang akurat dan mutakhir sangat penting agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran dan meminimalkan risiko tumpang tindih atau salah sasaran. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi digital dan *big data analytics* bisa membantu proses verifikasi data penerima secara lebih cepat dan valid. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kerja sama dengan RT/RW setempat yang lebih memahami kondisi nyata di lapangan. Dengan basis data yang kuat, distribusi bantuan dapat dilakukan lebih efisien dan efektif di setiap tahapannya. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial yang dijalankan.

Selain pendataan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses distribusi juga menjadi langkah penting. Petugas dan relawan yang terjun langsung ke lapangan perlu dibekali pelatihan rutin terkait prosedur penyaluran bantuan yang cepat, aman, dan transparan. Menurut penelitian oleh Yuliani dan Santosa (2020), pelatihan SDM yang berkelanjutan mampu meningkatkan responsivitas tim distribusi dalam kondisi darurat bencana. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas personal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan distribusi bantuan. Pelatihan ini tidak hanya menyangkut teknis distribusi, tetapi juga mencakup aspek komunikasi, penanganan krisis, dan penggunaan alat bantu logistik. Dengan SDM yang profesional, diharapkan distribusi bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan minim hambatan.

Peningkatan efektivitas juga dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam proses distribusi. Selama ini, salah satu kendala yang sering terjadi adalah miskomunikasi atau tumpang tindih peran antara lembaga terkait seperti BPBD, Dinas Sosial, dan pihak ketiga lainnya. Dengan membentuk tim koordinasi terpadu yang melibatkan semua stakeholder, proses distribusi bantuan dapat berlangsung

lebih terstruktur dan terpantau dengan baik. Selain itu, pembagian tugas yang jelas dan penggunaan sistem komunikasi terpusat akan mempercepat respon di lapangan. Koordinasi yang baik juga mendorong transparansi dan akuntabilitas selama proses distribusi berlangsung. Hal ini penting agar bantuan yang disalurkan benar-benar sampai ke tangan yang tepat.

Upaya lain yang juga penting adalah memperbaiki infrastruktur pendukung, terutama akses jalan menuju wilayah-wilayah rawan bencana. Banyak kasus di mana distribusi bantuan terhambat karena kondisi jalan yang rusak atau tergenang banjir sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk sampai ke lokasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi titik-titik kritis yang sering mengalami hambatan akses dan melakukan perbaikan infrastruktur secara berkala. Selain itu, penyediaan transportasi darurat seperti perahu karet atau kendaraan amfibi juga harus diprioritaskan untuk daerah yang sulit dijangkau. Infrastruktur yang memadai akan sangat menunjang kelancaran distribusi bantuan sosial dalam situasi darurat. Investasi jangka panjang di sektor ini akan memberikan dampak besar dalam mengurangi hambatan logistik.

Penguatan partisipasi masyarakat juga merupakan strategi penting untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan sosial. Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi program bantuan sosial. Menurut Rahayu dan Pratama (2021), pelibatan masyarakat secara aktif mampu menciptakan rasa memiliki terhadap program bantuan dan memperkuat solidaritas sosial di tingkat lokal. Dengan demikian, distribusi bantuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Bentuk partisipasi ini bisa berupa pembentukan kelompok siaga bencana atau relawan desa yang siap membantu kapan saja dibutuhkan. Keterlibatan aktif masyarakat akan membuat proses distribusi bantuan lebih cepat dan efektif.

Evaluasi dan monitoring secara rutin harus menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya perbaikan distribusi bantuan sosial. Evaluasi memungkinkan pemerintah untuk melihat sejauh mana efektivitas distribusi yang telah dilakukan dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Proses monitoring juga penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan atau masalah yang terjadi selama pelaksanaan bantuan. Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan baru yang lebih baik di masa mendatang. Dengan sistem evaluasi yang transparan, masyarakat juga bisa ikut mengawasi jalannya program bantuan. Semua ini bertujuan agar distribusi bantuan sosial ke depan bisa lebih baik, tepat sasaran, dan berdampak positif secara menyeluruh.

Terakhir, Untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang selama ini menjadi kendala utama dalam distribusi bantuan sosial saat bencana banjir, berbagai upaya strategis perlu dilakukan agar efektivitas penyaluran bantuan dapat meningkat di masa depan. Menurut Ritonga (2024) Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat yang memiliki sumber daya lebih memadai. Dengan menggandeng mitra strategis melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau kemitraan formal lainnya, kebutuhan dana tambahan untuk operasional bantuan sosial dapat terpenuhi lebih optimal. Selain itu, Dinas Sosial perlu menyusun perencanaan anggaran yang lebih matang

dan berbasis risiko, di mana prediksi potensi bencana di wilayah rawan sudah diperhitungkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga tidak hanya mengandalkan dana darurat yang seringkali terbatas. Upaya lain yang penting dilakukan adalah mendorong digitalisasi dalam penggalangan dana bantuan, seperti membuka kanal donasi online yang transparan dan akuntabel, agar partisipasi publik semakin luas dan dana yang terkumpul bisa menjadi cadangan untuk kondisi darurat. Tidak kalah penting, Dinas Sosial juga harus memperjuangkan peningkatan alokasi dana kebencanaan melalui advokasi kepada pemerintah daerah dan legislatif setempat, dengan menyajikan data dampak bencana secara komprehensif agar urgensinya diakui dalam prioritas pembangunan. Literasi keuangan di tingkat OPD pun harus diperkuat agar pengelolaan anggaran yang ada lebih efisien dan tepat sasaran. Jika semua upaya ini dilakukan secara berkesinambungan, maka keterbatasan anggaran yang selama ini menjadi hambatan besar dapat diatasi secara bertahap, sehingga ke depan proses distribusi bantuan tidak lagi terkendala oleh masalah finansial.

Simpulan

Distribusi bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki peranan vital dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir. Berbagai bentuk bantuan seperti sembako, layanan dapur umum, dan fasilitas pengungsian telah disalurkan melalui koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Namun, distribusi tersebut tidak lepas dari berbagai kendala seperti akurasi data penerima yang belum optimal, aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, serta minimnya anggaran yang tersedia. Kendala-kendala ini berdampak pada lambatnya proses distribusi dan potensi ketidaktepatan sasaran. Meski begitu, dampak dari distribusi bantuan sosial cukup signifikan dalam mendukung keberlangsungan hidup masyarakat terdampak, menjaga ketahanan sosial, dan memulihkan ekonomi pascabencana. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya penguatan sistem pendataan, peningkatan kapasitas petugas, serta koordinasi lintas sektor agar distribusi bantuan lebih cepat dan merata. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan meninjau efektivitas penerapan digitalisasi dalam pendataan dan pelaporan distribusi bantuan, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Angraini, R. (2025). Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Palopo).
- Anwar, M., & Mustofa, M. (2021). Evaluasi Efektivitas Bantuan Sosial pada Korban Banjir di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 112-123.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo. (2024). *BPBD Kabupaten Sidoarjo Melakukan Pendistribusian Sembako Sejumlah 218 Paket di Desa*. <https://bpbd.sidoarjokab.go.id/>
- BPBD Sidoarjo. (2024). Laporan Tahunan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo. Diakses dari: <https://bpbd.sidoarjokab.go.id>

- Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. (2023). *Bantuan Korban Bencana Alam*. <https://www.dinsos.sidoarjo.go.id/005/1680054936>
- Dinas Sosial Sidoarjo. (2023). Penanganan Bencana Banjir dan Distribusi Bantuan Sosial. Diakses dari: <https://dinsos.sidoarjo.go.id>
- Fadilah, A. (2020). Manajemen Logistik Bencana di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Hadi, S. (2020). Manajemen Penanggulangan Bencana di Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Handayani, R., & Prasetyo, A. (2020). Analisis Koordinasi Antar Lembaga dalam Distribusi Bantuan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(3), 210-225.
- Handayani, R., Hadi, S., & Kurniawan, A. (2021). *Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Alam: Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2).
- Kemensos RI. (2023). Pedoman Pelaksanaan Distribusi Bantuan Sosial saat Bencana. <https://kemensos.go.id>
- Novianti, F. (2023). Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3).
- Oktaviani, D., Puspaningrum, S., Mauliva, F., Haniifah, N., & Nawangsari, E. R. (2024). Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Banjir di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(10), 4555–4568. DOI: <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i10.2972>
- Paripurno, E. T., & Prasetyo, J. D. (2021). Pengelolaan bantuan logistik bencana banjir: studi kasus tanggap darurat bencana di kota kendari tahun 2017. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 25-38.
- Putri, R. F. W., Hariani, M., Safira, M. E., & Vitrianiingsih, Y. (2024). Pemberian pakaian gratis sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan psikologis di masyarakat. *Economic Xenization Abdi Masyarakat*, 2(1), 45-50.
- Rahmawati, E., & Sulistyono, B. (2023). "Kapasitas SDM dalam Penanggulangan Bencana." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(2), 89-102.
- Republik Jatim. (2023). "Peran Dinsos Sidoarjo dalam Penanganan Banjir." <https://republikjatim.com/berita/peran-dinsos-sidoarjo-banjir>
- Republik Jatim. (2024). *Sepekan Tak Kunjung Surut, Pemkab Salurkan Bantuan Korban Banjir di Kecamatan Candi dan Sidoarjo*. <https://republikjatim.com/news-12340-sepekan-tak-kunjung-surut-pemkab-salurkan-bantuan-korban-banjir-di-kecamatan-candi-dan-sidoarjo>
- Ritonga, A. (2024). Tinjauan Kebijakan: Evaluasi Efektivitas Upaya Penanggulangan Bencana di Desa Ciwangi. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 102-127.
- Setiawan, A., Rusba, K., Ramdan, M., Saputra, D., & Swandito, A. (2024). Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Balikpapan. *Identifikasi*, 10(1), 42-48.
- Suparno. (2022). *Pemulihan Ekonomi Pasca-Bencana: Studi Kasus di Kabupaten Klaten*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(1).

-
- Sutanto, D. (2021). Pengaruh Faktor Alam terhadap Distribusi Bantuan Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 15(4), 134-148.
- Widyaningrum, N., Kodar, M. S., Purwanto, R. S., Priambodo, A., & Fadlurrahman, I. (2020). Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 40-48.
- Yuliani, N., Irawan, B., & Prakoso, C. T. (2020). Peranan Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Samarinda. *Administrasi Publik*, 8(1), 9018-9029.
- Yulianti, S. (2022). Tantangan Aksesibilitas dalam Penanganan Banjir. *Jurnal Kebencanaan Indonesia*, 8(1), 56-67.